

FORMULIR RENCANA AKSI TAHUN 2018

Nama Peserta Pelatihan : Maria J.S. Senduk
Olivia Elly Pondaag

Nama Atasan Peserta : Drs. Gerardus Mogi

Apakah anda mengimplementasikan Rencana Aksi ini sendiri atau berkelompok?

sendiri

berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain dalam tabel di bawa.

No:	Nama anggota kelompok lainnya
1	-
2	-

Nama Mentor : 1. Gustaf Kasfin Kasmiri
2. Wahyu Widjayanto
3. Catur Panggih Pamungkas

Program : *Internship* Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan

Lokasi Pelaksanaan : Jakarta

Tanggal Pelaksanaan : 01 Januari s.d. 31 Desember 2018

1. Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam institusi/organisasi/lingkungan Anda yang mungkin dapat Anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah Rencana Aksi!
 - Keterlambatan penyerapan dana transfer ke daerah khususnya DAK oleh OPD teknis.
 - Kurangnya koordinasi pemerintah daerah dengan provinsi terkait Dana Bagi Hasil Provinsi (BBN-KB, PKB, dan Pajak Rokok)
 - Ketergantungan belanja modal dari sumber dana DAK atau dari dana transfer pusat lainnya.
 - Pendapatan Asli Daerah belum optimal.
 - Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait dengan penyediaan data indikator pemeringkatan daerah khususnya di bidang kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan infrastruktur.

- Penyerapan belanja belum optimal karena manajemen kas atau anggaran kas yang belum tertib.
- Manajemen kas masih dianggap sebagai aktivitas yang tidak cukup penting, sehingga kegiatan manajemen kas seringkali tidak diprioritaskan karena ketiadaan penilaian terhadap kinerja pengelolaan kas dimana fokus penilaian pengelolaan keuangan daerah masih terbatas pada kinerja penyerapan anggaran dan pelaporan keuangan.
- Anggaran kas yang telah disusun, seringkali diabaikan dimana perangkat daerah yang mengusulkan anggaran kas tidak terlalu konsisten menjalankan anggaran kas yang telah diusulkan sebelumnya.
- Tidak adanya peringatan (*warning*) maupun hukuman (*punishment*) atas rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menjalankan anggaran kas mereka.
- Lemahnya kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) perangkat daerah dalam membuat perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah.
- Kurangnya pemahaman bendahara perangkat daerah atas pengontrolan belanja daerah dimana sering tidak bisa dihindari pembayaran belanja yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas tidak optimal.
- Terdapat saldo kas yang menganggur (*idle cash*) karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang diusulkan oleh perangkat daerah dan banyak kegiatan yang pelaksanaannya menumpuk di akhir tahun anggaran.
- Rencana kegiatan dan anggaran kas tidak berkorelasi dengan baik sehingga setiap saat perangkat daerah meminta ke PPKD selaku BUD untuk dilakukan perubahan anggaran kasnya karena tidak tersedianya kas pada saat yang dibutuhkan secara tepat jumlah.
- Pelaksanaan kegiatan SKPD atau perangkat daerah yang tertunda karena belum tersedianya dana (surat penyediaan dana belum ada).
- Tidak tersedianya gambaran posisi kas yang jelas bagi perangkat daerah.
- Belum adanya dukungan sistem/teknologi informasi untuk manajemen kas, saat ini sistem informasi masih terbatas pada pencatatan anggaran dan realisasinya, pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia perencana di tiap OPD sebagai perumus program dan kegiatan yang berhubungan dengan dokumen perencanaan (RPJMP, RENJA, RKPD).
- Penyusunan anggaran berbasis aspiratif belum dilaksanakan secara baik sehingga penyusunan RKA cenderung kurang memperhatikan aspek kebutuhan nyata masyarakat.

2. Apakah judul Rencana Aksi Anda?

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Kinerja SDM dan Pelayanan Dasar Publik

3. Apakah manfaat/hasil dari Rencana Aksi Anda tersebut?

- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Tomohon.
- Meningkatkan akurasi dan validitas data pendukung untuk indikator-indikator dalam rangka pemeringkatan daerah Kota Tomohon.
- Memonitor dan mengevaluasi indikator-indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia.
- Meningkatkan pelayanan dasar publik.
- Para pelaksana kegiatan di setiap OPD lebih memahami penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.
- Para pelaksana kegiatan khususnya pejabat pengelola keuangan, bendahara, kuasa BUD mampu untuk menyusun anggaran kas, mengendalikan dan mengelola kasnya agar senantiasa tersedia secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk setiap kegiatan yang telah direncanakan sehingga kegiatan publik pada SKPD terkait tidak terhambat.
- Perangkat daerah mampu mengelola *idle cash* supaya berada pada jumlah minimum.
- Perangkat daerah mampu menyelenggarakan aktivitas manajemen kas yang memadai.
- Mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.
- Perangkat daerah tidak mengabaikan anggaran kas yang telah disusun dan konsisten menjalankan anggaran kas yang telah diusulkan sebelumnya.
- Mengembangkan aplikasi EPRA dan anggaran kas untuk mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

4. Uraikan bagaimana Rencana Aksi anda memenuhi kriteria SMART!

Specific Spesifik	<i>Aktifitas spesifik apa yang akan Anda lakukan dalam melaksanakan Rencana Aksi Anda?</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Mengumpulkan data-data sekunder dan regulasi seperti data APBD, laporan realisasi APBD, data lainnya terkait dengan data penurunan tingkat kemiskinan 5 tahun

	<p>terakhir, data Indeks Pembangunan Manusia 5 tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data pelayanan dasar public bidang pendidikan yang meliputi rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni SMP, harapan lama sekolah untuk periode 5 tahun terakhir. • Mengumpulkan data pelayanan dasar publik bidang kesehatan yang meliputi data penurunan baduta <i>stunting</i>, presentasi balita mendapat imunisasi, presentasi persalinan ditolong tenaga kesehatan untuk periode 5 tahun terakhir. • Mengumpulkan data pelayanan dasar publik bidang infrastruktur yang meliputi presentasi rumah tangga sumber air minum layak, presentasi rumah tangga akses sanitasi layak, presentasi jalan kondisi pelayanan mantap untuk periode 5 tahun terakhir. • Menganalisis akurasi anggaran kas atas realisasinya. • Membuat desain monitoring perencanaan kas. • Melakukan pendampingan dalam penyusunan APBD mulai dari perencanaan anggaran (RKPD, KUA-PPAS) sampai RKA dan hasil akhir APBD 2019) <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dalam bentuk koordinasi dan rapat dengan OPD terkait per triwulan. • Dilakukan sosialisasi, rapat, dan FGD dalam rangka Monev Kinerja Pengelolaan Keuangan daerah • Identifikasi permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah • Mengajukan/meminta persetujuan dan dukungan pimpinan • Mengusulkan ke atasan untuk Perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah • Inisiasi penggunaan system Teknologi Informasi dalam pengelolaan kas dan EPRA sebagai wujud dari kinerja pengelolaan daerah.
<p>M Measurable Dapat diukur</p>	<p><i>Bagaimana Anda mengukur keberhasilan Rencana Aksi Anda – Berapa orang? Berapa lama? Berapa banyak yang diproduksi? Berapa persentase perubahan yang dicapai?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta yang diharapkan berjumlah 8 instansi penyedia data yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah sebagai coordinator, Setda, Dinas Kesehatan, Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Bapelitbang dan BPS. • Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi, FGD, Rapat dalam rangka Monev • Sumber pendanaan, Sumber daya Manusia, serta Hasil atau Output Monitoring dan Evaluasi tersebut bisa diukur dan bisa dicapai. • Tersedianya aplikasi EPRA dan pengelolaan kas. • Adanya regulasi yang lebih komprehensif terkait EPRA dan pengelolaan kas.
<p>A Achievable Dapat dicapai</p>	<p><i>Apa alasan Anda, mengapa Anda sangat yakin bahwa Rencana Aksi anda tersebut dapat dilaksanakan?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber data dan penyedia data berada di lingkup Pemerintah Kota Tomohon.

	<ul style="list-style-type: none"> Menyisipkan data-data indikator ratio kesehatan fiskal, terkait layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan infrastruktur dalam kegiatan EPRA (Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran). Pengadaan sistem TI untuk mekanisme anggaran kas dan EPRA. Dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Pimpinan Daerah. Adanya MoU antara DJPK dan Pemerintah Kota Tomohon terkait implementasi Rencana Aksi ini.
Relevant Relevan	<i>Bagaimana relevansi Rencana Aksi Anda terhadap: (a) institusi/organisasi anda (b) tugas anda, dan (c) pelatihan ini?</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Setiap tahun SKPD terkait yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Bappelitbang, Dinas PU, Bagian Ortala diharuskan membuat laporan terkait data-data yang dibutuhkan dalam rangka pemeringkatan daerah. Tugas dari SKPD terkait adalah melaporkan data-data kinerja pengelolaan keuangan daerah, LAKIP, RKPD, APBD. Pimpinan daerah secara periodik bisa mengetahui kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan informasi lebih valid dan akurat.
T imely Rentang/kete patan waktu	<i>Mengapa waktu yang Anda tetapkan tersebut adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan Rencana Aksi Anda?</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Per triwulan dilakukan koordinasi dan verifikasi data dengan BPS. Triwulan I dilakukan sosialisasi atau FGD dengan penyedia data. Per bulan dilaksanakan rapat bersamaan dengan rapat EPRA untuk memverifikasi kesamaan data.

5. Gunakan format berikut ini untuk menunjukkan:

- Kegiatan-kegiatan yang akan anda laksanakan
 - Kapan anda memulai dan mengakhiri kegiatan-kegiatan tersebut
- Jika Rencana Aksi berkelompok tuliskan kependekan nama anggota yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan*

NAMA KEGIATAN	Triwulan ke-1	Triwulan ke-2	Triwulan ke-3	Triwulan ke-4
1. Draft Rencana Aksi				
1.1. Surat Pemberitahuan kementerian keuangan ke pemerintah daerah	X			
1.2. Membuat TOR kegiatan	X			
1.2. Mendiskusikan dengan pimpinan	X			
2. Persetujuan Atasan				
2.1. Mengajukan TOR pada atasan	X			

3. Persiapan				
3.1. Melaksanakan sosialisasi	X			
3.2. Mengumpulkan data sekunder		X		
3.3. Mengumpulkan data				
3.4. Menghubungi penyedia data				
3.5. Membuat undangan dan menyebarkan				
4. Implementasi				
4.1. Sosialisasi	X			
4.2. Rapat dan evaluasi	X	X		
4.3. Pendampingan mentor DJPK	X			
5. Selesai dan melaksanakan rencana aksi yang lain				
5.1. Pembuatan laporan				X
5.2. Monitoring dan evaluasi				X

6. Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Anda, dan bagaimana Anda mendapatkan sumber daya tersebut?
- Sumber Daya Manusia berasal dari perangkat daerah yang sudah ada sebagai penyedia data.
 - Pendampingan dari Mentor DJPK.
 - Pendanaan relatif sesuai kebutuhan.
7. Identifikasi kemungkinan hambatan dalam mengimplementasikan Rencana Aksi anda? Bagaimana cara anda menanggulangnya?
- Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan daerah.
 - Perpindahan tempat tugas baru, jika ini terjadi maka kegiatan pelatihan pada Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon akan tetap dilaksanakan melalui monitoring secara tidak langsung.
8. Bagaimana Rencana Aksi Anda dapat meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), kesadaran gender (*gender awareness*) dan manajemen perubahan (*change management*)?

Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel akan mendukung optimalisasi anggaran dan pelayanan publik bagi masyarakat.• Pemantauan secara rutin atas indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah serta dampaknya terhadap pelayanan public akan mendukung perbaikan kebijakan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah
Kesadaran Gender (<i>gender awareness</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Action plan ini melibatkan seluruh pejabat dan pegawai di unit penyedia data maupun unit terkait tanpa membedakan gender.
Managemen Perubahan (<i>change management</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Terjadinya perubahan mindset dari pimpinan daerah untuk selalu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah.
